

THE ANALYSIS OF RPJMD PERFORMANCE EVALUATION OF BARITO KUALA REGENCY YEAR 2012-2017

Muhammad Saleh¹⁾*, Ruddy Syafrudin²⁾

^{1) 2)} Faculty Of Economic and Business, Lambung Mangkurat University, Jalan Brigjen Haji Hasan Basri
No.29, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia

*fikri_alfikri17@yahoo.com

Abstract - This study aims to determine the results of regional development based on performance targets which have been defined and listed in the document RPJMD Barito Kuala Regency Year 2012-2015. The method of this research is quantitative descriptive analysis. The result shows that the Main Performance Achievement can be viewed as: (a). The economic growth of Barito Kuala Regency in 2013-2015 had only reached an average of 4.66%. (b). The achievement of GRDP per capita exceeds the target. (c). The industrial sector growth is not achieved. (d). The growth of Service sector is average 7.52%. The target of RPJMD for trade-specific services has not been achieved. (e). The realization of the average growth in the agricultural sector period 2012-2015 is 1.26%; however, it is not measurable in the RPJMD. (f). Human development index (HDI) has not reached the target. There are only 88.81% of the target RPJMD. (g). Life expectancy (AHH) is reached until 100.82%. (h). The average of school duration in Barito Kuala Regency is below the average of Province. (i). The school hopes (HLS) of the Barito Kuala Regency is below the provincial average. (j). The poverty rate in 2016 is 4.75%, in which RPJMD target at the end of the year of the Regent's term of 4.85%. (k). The level of community satisfaction is not measurable. (l). Performance accountability. The realization of SAKIP value indicator of Barito Kuala Regency in 2016 is BB (70-80). Whether the value is compared with the target of RPJMD at the end of the year of the Regent's tenure, the value is BB (m). BPK opinion realization in 2015 gets Unqualified Opinion (WTP).

Keywords: Performance Evaluation, RPJMD Barito Kuala

ANALISIS EVALUASI KINERJA RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012-2017

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012- 2017. Metode penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Utama (a). Pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013-2016 baru mencapai rata- rata sebesar 4,66%. (b). PDRB per kapita, PDRB per kapita pencapaiannya melampaui targetnya. (c). Pertumbuhan sektor industri, tidak tercapai. (d). Pertumbuhan sektor jasa rata- rata sebesar 7,52%. Target RPJMD khusus jasa perdagangan belum tercapai. (e). Pertumbuhan sektor pertanian, realisasi rata- rata pertumbuhann pada periode 2012- 2016 adalah sebesar 1,26%, Tetapi dalam RPJMD tidak terukur. (f). Indeks pembangunan manusia (IPM) belum mencapai target yaitu baru 88,81% dari target RPJMD. (g). Angka harapan hidup (AHH) tercapai sebesar 100,82%. (h). Rata- rata lama sekolah daerah Barito Kuala dibawah rata- rata Provinsi. (i). Angka harapan lama sekolah (HLS) daerah Barito Kuala dibawah rata- rata Provinsi. (j). Tingkat kemiskinan, realisasinya pada tahun 2016 sebesar 4,75%, Jika dibandingkan dengan target RPJMD pada akhir tahun masa jabatan Bupati sebesar 4,85%. (k).Tingkat kepuasan masyarakat tidak terukur. (l). Akuntabilitas kinerja, realisasi indikator nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 nilainya BB (70-80). Jika dibandingkan dengan target RPJMD pada akhir tahun masa jabatan Bupati nilainya BB.(m). Opini BPK realisasinya pada tahun 2015 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, RPJMD Barito Kuala.

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan sejak 2001 adalah membagi sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan di daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah “kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan”. Adanya undang-undang tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerahnya dan diharapkan pemerintah daerah mengetahui aspirasi dan kebutuhan dari masyarakatnya, sehingga kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketimpangan antar daerahnya.

Pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Menurut Sadono Sukirno(1985) pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sehingga baik pertumbuhan maupun pendapatan per kapita merupakan dua unsur yang paling diutamakan tanpa memperhatikan aspek lain seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang sering diabaikan.

Umumnya pembangunan difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah permintaan barang dan jasa dari luar, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah (Boediono,1999).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi berarti apabila diikuti oleh pemerataan atas hasil-hasil pembangunan, namun kenyataannya pembangunan tidak selalu berlangsung secara merata. Ada daerah yang cepat mengalami pertumbuhan, sementara beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumberdaya yang dimiliki. Dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Pusat Dan Pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut Kabupaten Barito Kuala telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 -2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan kabupaten/kota untuk setiap tahunnya, selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. **Visi** Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 adalah : **BARITO KUALA SAMARASA (Barito Kuala, Satu Kata Untuk maju, Mandiri, Mewujudkan Rakyat Berdaya Saing Yang Sejahtera).**

Evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Evaluasi RPJMD dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kinerja masing-masing program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program, upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing SOPD, dan dapat

diperoleh umpan balik (*feed back*) dalam pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang sehingga capaian hasilnya menjadi lebih baik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, *pertama*, bagaimana tingkat kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala 2012- 2017. *Kedua*, faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala 2012- 2017.

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pembangunan Ekonomi. Menurut Lincoln Arsyad (1999) istilah pembangunan ekonomi adalah: (1).Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan PDB/PNB pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk. (2). Perkembangan PDB/PNB yang terjadi disuatu negara diikuti oleh perubahan dan modernisasi struktur ekonominya.

Sebelum tahun 1970-an pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja. Namun setelah itu, banyak negara yang mulai menyadari bahwa pertumbuhan tidak identik dengan pembangunan. Pembangunan saat ini tidak lebih diukur dari suatu prestasi kuantitatif semata. Besarnya GNP perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan lapangan pekerjaan serta inflasi yang terkendali merupakan tolak ukur utama pembangunan. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan percepatan pertumbuhan ekonomi tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh (Kuncoro, 1997).

Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara- negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan- perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan atau dikenal sebagai *economic development is growth plus change* yaitu pembangunan ekonomi (Sukirno, 2001).

Menurut Todaro (2006) proses pembangunan disemua masyarakat paling harus memiliki tiga tujuan inti yaitu: (1).Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. (2).Peningkatan standar hidup berupa peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan. Hasil akhir yang hendak dicapai adalah perbaikan kesejahteraan material dan menumbuhkan harga diri pribadi dan bangsa. (3).Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial yaitu membebaskan mereka dari sikap ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain dari setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indicator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi dalam suatu Negara. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh system kelembagaan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP) / Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Simon Kuznets (dalam Jhingan, 1975) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan terus menerus dalam jangka produk per kapita atau per pekerja, seringkali dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk dan biasanya dengan perubahan struktural. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam factor yaitu faktor ekonomi (misalnya sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi) dan factor non ekonomi (misalnya lembaga sosial, sikap budaya, nilai, moral, kondisi politik, kelembagaan dan sebagainya).

Menurut Sadono Sukirno (2007), masalah dalam pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang dihadapi suatu negara dapat dibedakan kepada tiga aspek. Aspek pertama bersumber dari perbedaan diantara tingkat pertumbuhan potensial yang dapat dicapai, dan tingkat pertumbuhan yang sebenarnya tercapai. Aspek kedua mengenai masalah pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan potensi pertumbuhan itu sendiri. Aspek yang ketiga mengenai masalah pertumbuhan ekonomi mengenai keteguhan pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya.

Pembangunan Ekonomi Daerah. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad 1999). Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai.

Pembangunan ekonomi daerah mencakup pembentukan institusi- institusi baru, pembangunan industrial ternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar- pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan baru (Arsyad, 1999).

Masalah dalam pembangunan daerah terletak pada kebijakan- kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan (Arsyad,1999).

Menurut Sjafrizal (2012), pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran wilayah ditujukan agar kondisi fisik daerah yang maju seperti adanya prasarana dan sarana, perumahan dan lingkungan pemukiman, kegiatan ekonomi masyarakat, fasilitas pelayanan social dibidang pendidikan dan kesehatan, kualitas lingkungan hidup, dan lain-lain. Menurut Lincolin Arsyad (1999) terdapat beberapa teori yang secara parsial telah mengarahkan pada pemahaman mengenai arti penting pembangunan ekonomi daerah yaitu:

a. Teori Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian memberikan 2 konsep dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju kedaerah yang berupah rendah.

b. Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa factor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Jika sumber daya local digunakan termasuk tenaga kerja dan bahan baku maka akan menghasilkan kekayaan dan penciptaan peluang kerja.

c. Teori Lokasi

Faktor lokasi merupakan hal yang penting bagi pengembangan kawasan industry karena perusahaan dapat meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Variabel lain yang mempengaruhi kualitas suatu lokasi meliputi upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas- fasilitas pendidikan, serta kualitas pemerintah daerah. Namun, sekarang ini teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

d. Teori Tempat Sentral

Teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya industri dan bahan baku. Teori ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di kota maupun desa.

e. Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari teori ini. Hal ini didasarkan karena kekuatan pasar yang semakin kuat yang cenderung memperparah kesenjangan antar daerah (maju vs terbelakang). Menurut Myrdal (1957) (dalam Arsyad, 1999) daerah yang lebih maju dibandingkan daerah yang erbelakang dan akan terus berlanjut ini dinamakan *backwash effect*.

f. Model DayaTarik

Teori ini adalah model pembangunan ekonomi yang sering digunakan oleh masyarakat. Hal yang mendasarinya adalah suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional. Teori pertumbuhan ekonomi regional menurut Sjafrizal (2008), terkait dengan proses pencarian faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, terdapat empat jenis model pertumbuhan ekonomi regional yang akan menghasilkan analisis dan kesimpulan tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional yaitu:

a. Model Basis Ekspor

Model ini diperkenalkan oleh Douglas C. North tahun 1956. (dalam Sjafrizal, 2008). Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh suatu daerah. Bila daerah tersebut dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki keuntungan kompetitif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah akan dapat ditingkatkan.

b. Model *Interregional Income*

Model ini merupakan perluasan dari model basis ekspor dengan memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah. Model ini dikembangkan oleh Harry W. Richardson tahun 1978 (dalam Sjafrizal, 2008). Berbeda dengan model basis ekspor yang mengasumsikan export sebagai *exogenous variable*, maka dalam model ini, export diasumsikan sebagai *factor* yang berada dalam *system (endogeneous variable)* yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah.

c. Model Neo Klasik

Model ini dipelopori oleh George H. Bort tahun 1960 (dalam Sjafrizal, 2008). Menurut model ini pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan ditentukan oleh kemampuan daerah untuk meningkatkan kegiatan produksinya yang ditentukan oleh potensi daerah tersebut, mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah.

d. Model Penyebab Berkumulatif

Model ini dikemukakan oleh Nikolas Kaldor (dalam Sjafrizal, 2008). Model ini tidak percaya pemerataan pembangunan antar daerah akan dapat dicapai dengan sendirinya berdasarkan mekanisme pasar. Menurut model ini ketimpangan pembangunan regional hanya akan dapat dikurangi melalui program pemerintah. Karena jika diserahkan ke mekanisme pasar maka ketimpangan akan meningkat seiring meningkatnya pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah. Menurut Robinson Tarigan (2005) mengemukakan bahwa perencanaan dapat mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan **berbagai factor noncontrollable** yang relevan, memperkirakan factor-factor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Evaluasi Pembangunan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Evaluasi RPJMD dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kinerja masing-masing program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program, upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing SKPD (SOPD), dan dapat diperoleh umpan balik (*feed back*) dalam pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang sehingga capaian hasilnya menjadi lebih baik.

METODE PENELITIAN

Data yang diperlukan dalam analisis Evaluasi Kinerja RPJMD ini adalah laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Kuala Tahun Anggaran 2012, LKPj Bupati Barito Kuala Tahun Anggaran 2013, LKPj Bupati Barito Kuala Tahun Anggaran 2014, LKPj Bupati Barito Kuala Tahun Anggaran 2015, LKPj Bupati Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) Bupati Barito Kuala tahun 2012- 2017, serta data yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2012- 2017. Data Barito Kuala Dalam Angka 2012- 2016, Data PDRB Barito Kuala 2012- 2016 dan data lainnya yang mendukung penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini bentuk data sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi pemerintah, data tersebut antara lain (1) berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik atau Statistik Daerah, seperti: berbagai daerah dalam angka. Kemudian data yang ada pada LKPj Bupati Barito Kuala periode 2012- 2017.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu : Form *Check List*, untuk mengumpulkan data dokumentasi dan data sekunder dari berbagai sumber. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis dan menafsirkan data kuantitatif yang didapatkan dalam penelitian ini sesuai dengan teori. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Analisis perbandingan

Pada kajian ini analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan target RPJMD tahun 2012- 2017 dengan realisasi capaian kinerja. Hasil perhitungan antara target RPJMD dengan realisasi capaian kinerja dapat diketahui dari status capaian masing-masing indikator yang dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu :

- a) Tercapai, apabila capaian kinerja sampai dengan tahun 2012-2107 seluruh target RPJMD tahun 2012-2017 telah tercapai 100% atau lebih ($\geq 100\%$).
 - b) Tidak Tercapai, apabila capaian kinerja sampai dengan tahun 2012-2017 seluruh target RPJMD tahun 2012-2017 tercapai $<100\%$
- 2) Analisis kebijakan

Analisis kebijakan digunakan untuk menjabarkan kebijakan - kebijakan pada masa yang lalu dan merumuskan kebijakan pembangunan pada masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Geografik Wilayah.

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Barito Kuala dengan nama ibukotanya Marabahan, secara geografik terletak paling barat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan luas wilayah mencapai kuang lebih 2.966,96 Km² atau sekitar 7,98% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi geografis berada pada derajat 29° 50'' – 3 derajat 30' 18''LS dan 114 derajat 20' 50 – 114 derajat 50' 18'' BT serta 2 derajat 29' 50'' – 3 derajat 30' 18'' LU dengan batas-batas wilayah meliputi :

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten HSU dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalsel serta Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng.
2. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng.
4. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam pengolahan keuangan daerah merupakan kebijakan utama guna mendukung terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih. Dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang baik, akan terwujud penyelenggaraan pemerintah yang mampu menciptakan optimasi pelayanan terbaik bagi masyarakat, yang memberikan kepuasan dan sekaligus merefleksikan terwujudnya pemerintahan yang amanah. Untuk maksud tersebut berbagai kebijakan terkait dengan pengolahan keuangan, dilakukan dengan menerapkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP), dengan pelayanan yang di upayakan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sesuai RPJMD Tahun 2012-2017, besaran anggaran keuangan yang dikelola daerah Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya meningkat.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah kabupaten dalam kurun waktu lima tahun sangat berkembang meningkat Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintahan termasuk intensitas pembangunan di Kabupaten Barito Kuala beserta manfaat hasil-hasilnya, juga sangat meningkat. Hal ini dapat diindikasikan dari nilai total APBD per tahun yang selalu meningkat (tabel 4.1)

Tabel 4.1
Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2017
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN	RENCANA	REALISASI	%
2012	701.692.877.388	799.067.173.031,88	113,88
2013	904.413.305.544	930.230389.068,36	115,64
2014	916.749.825.022	977.701.174.709,29	106,65
2015	1.142.502.827.080	1.150.009.328.727,03	100,00
2016	1.300.868.384.537	1.289.269.048.7915,00	99,11
2017	1.137.439.390.530		

Rata-rata 107,19

Sumber : BPKAD Kabupaten Barito Kuala, April 2017

Pengelolaan Belanja Daerah

Salah satu unsur pengelolaan keuangan daerah adalah belanja daerah, yang diartikan sebagai seluruh pengeluaran dana dari kas daerah. Di samping peraturan perundangan-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan belanja daerah diatur secara operasional melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah pada prinsipnya dibagi menjadi dua kategori besar yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yang dalam pemanfaatannya dan pengalokasinya didasarkan pada “**capaian kinerja**” yang harus direalisasikan oleh setiap unit perangkat daerah.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala pada Tahun Anggaran 2012 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan rencana anggarannya rata-rata realisasinya mencapai 93,62% ini merupakan pencapaian yang sangat tinggi, secara terinci dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Anggaran Belanja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2017

APBD KABUPATEN BARITO KUALA			
TAHUN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2012	753.604.130.441	705.901.981.733,29	93,67
2013	921.010.547.127	872.532.115.541,00	94,74
2014	1.077.182.365.093,53	995.607.260.750,00	92,43
2015	1.278.407.478.610,84	1.187.595.566.725,00	92,90
2016	1.400.043.530.469,87	1.321.326.617.262,60	94,30
2017	1.131.939.390.530	-	-
Rata-rata			93,62

Sumber : BPKAD Kabupaten Barito Kuala Per April 2017

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala selanjutnya dirinci menjadi realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, pada periode 2012- 2017 realisasi Belanja Tidak Langsung realisasinya mencapai 90,80%, tingkat pencapaian yang tertinggi terjadi pada tahun 2012 (94,54%), selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut :

Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dilakukan terhadap kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik. Kebijakan pembiayaan daerah untuk 5 (lima) tahun, tetap difokuskan pada pelayanan masyarakat secara langsung, yakni alokasi dana pinjaman tanpa bunga guna pembelian pupuk bersubsidi dan kegiatan ekonomi kreatif masyarakat lainnya, khususnya bagi masyarakat Rumah tangga Sasaran (RTS). Demikian pula kebijakan pembiayaan yang terkait dengan **pengeluaran pembiayaan**, diarahkan pada peningkatan jumlah penyertaan modal pemerintahan kabupaten Barito Kuala pada Bank Kalsel, PD. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PT. PBKM) serta untuk PDAM. Realisasi pembiayaan daerah, baik penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2017

TAHUN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (Rp)	REALISASI	
		PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp)	PEMBIAYAAN BERSIH (Rp)
2012	11.006.168.500	20.999.980.000	-9.993.811.500
2013	12.130.624.432	36.999.980.000	-24.869.355.568
2014	186.851.936.922,55	27.041.199.351	159.810.737.57 1,58
2015	154.352.249.830,84	14.590.85.900	139.761.383.93 0,84
2016	107.510.281.032,67	11.879.364.850	95.630.916.182
2017	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Barito Kuala, April 2017

Masalah dan Solusi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Suatu solusi secara substantif mempertegas untuk selalu mengupayakan optimasi pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan langkah ini dan melalui penerapan prinsip dimaksud, setiap alokasi anggaran daerah secara terbuka dan bertanggung jawab lebih mudah untuk dicermati pemanfaatannya, termasuk belanja yang lebih diorientasikan kepada kepentingan masyarakat secara langsung.

Hasil perbaikan pengelolaan keuangan dari Tahun Anggaran 2012 sampai Tahun 2016 sebagai kebijakan solusi terbukti telah memberikan pengaruh positif berupa peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Hasilnya adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah dianggap mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dengan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang ditandai oleh diberikannya Opini BPK-RI Tahun 2016 yang berkategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Nilai Kapitasi Daerah

Dampak kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah semakin meningkatkan nilai kapitasi aset daerah yang menjadi kekayaan daerah. Peningkatan nilai aset daerah untuk selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran 2012 sampai dengan saat ini, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala untuk seluruh jangka waktu **RPJMD** tahun 2012 – 2017 telah berlangsung meningkat bertambah semakin baik, yang diindikasikan dengan naiknya nilai APBD setiap tahunnya dengan total peningkatan dari tahun anggaran 2012 – 2017 adalah 33,42 % diperolehnya opini WTP serta bertambahnya nilai aset yang dimiliki pemerintah daerah.

Tabel 4.4
Ekuitas Dana dan Total Aset Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2017

TAHUN	KEWAJIBAN, EKUITAS DANA DAN ASET			NAIK (%)
	KEWAJIBAN	EKUITAS DANA	TOTAL ASET	
2012	87.734.965	1.774.449.590.851,25	1.774.537.325.816,27	15,32
2013	4.740.901.897	2.175.272.936.802,25	2.180.013.838.699,25	18,60
2014	355.532177,25	2.490.713.529.502,25	2.491.069.052.679,50	12,49
2015	5.297.305.568	1.824.123.066.600,49	1.829.420.374.186,49	-36,17
2016	11.070.992.184,84	1.995.247.162.860,47	2.006.318.165.045,31	8,82
2017	-	-	-	-
Rata- rata peningkatan				3,81

Sumber : BPKAD Kabupaten Barito Kuala, April 2017

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala tahun 2012 – 2016 dan target tahun 2017 yang dibiayai melalui Belanja Langsung APBD Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. Capaian kinerja yang menggambarkan pelaksanaan misi organisasi dengan dukungan capaian program dan kegiatan pada masing-masing SKPD, serta capaian kinerja RPJMD pada masing-masing urusan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama 5 (lima) dari tahun 2012 sampai tahun 2016 (akhir Desember) menunjukkan hasil yang baik, sebanyak 13 urusan capaian kinerjanya mencapai 100,00%, dan sisanya belum tercapai. Masih banyaknya kinerja yang belum tercapai ini sangat perlu dievaluasi apakah penetapan kinerjanya terlalu tinggi atau dananya untuk pembangunan tersebut tidak mencukupi ataukah juga SDMnya belum mampu melaksanakan program/ kegiatan yang telah direncanakan. Tetapi jika dilihat dari capaian kinerja utama yang berhasil mencapai target yang ditetapkan maka kemungkinan besar penetapan tagetnya terlalu tinggi, untuk sangat perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Dibawah ini rekapitulasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana terlihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5

**Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kabupaten Barito Kuala 2013-2017**

No	Urusan	Urusan Indikator (buah)	Tercapai (buah)	Tidak Tercapai (buah)	Tingkat Pencapaian (%)
A Urusan Wajib yang Dilaksanakan					
1	Pendidikan	7	6	1	85,71
2	Kesehatan	4	3	1	75,00
3	Lingkungan Hidup	8	6	2	75,00
4	Pekerjaan Umum	7	5	2	71,43
5	Penataan Ruang	2	2	0	100,00
6	Perencanaan Pembangunan	9	8	1	88,89
7	Perumahan	1	1	0	100,00
8	Kepemudaan dan Olahraga	2	2	0	100,00
9	Penanaman Modal	1	0	1	0,00
10	Koperasi dan UKM	2	1	1	50,00
11	Kependudukan dan Capil	4	2	2	50,00
12	Ketenagakerjaan	3	3	0	100,00
13	Ketahanan Pangan	6	5	1	83,33
14	Pemberdayaan Perempuan & P.A	3	1	2	33,33
15	KB dan Keluarga Sejahtera	6	3	3	50,00
16	Perhubungan	3	0	3	0,00
17	Komunikasi dan Informasi	6	4	2	66,67
18	Pertahanan	1	1	0	100,00
19	Kesbang dan Politik Dalam Negeri	4	*)	*)	*)
20	Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian (9 Bagian)	38	24	14	63,16
21	Pemberdayaan Masyarakat	3	2	1	66,67
22	Sosial	8	8	0	100,00
23	Kebudayaan	1	1	0	100,00
24	Kearsipan	4	4	0	100,00
25	Perpustakaan	4	1	3	25,00
B Urusan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan	10	4	6	40,00
2	Pertanian dan Peternakan	15	9	7	60,00
3	Kehutanan	2	2	0	100,00
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	2	2	0	100,00
5	Pariwisata	1	1	0	100,00
6	Industri	1	0	1	0,00
7	Perdagangan	3	2	1	66,67
8	Ketransmigrasian	2	2	0	100,00

Sumber: Diolah dari LKPj Bupati 2012-2017.

Capaian Kinerja Utama

Capaian kinerja utama adalah capaian kinerja yang menggambarkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan indikator makro dengan dukungan capaian program dan kegiatan pada masing-masing SKPD, serta capaian kinerja

RPJMD pada masing-masing urusan. Capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama 5 (lima) dari tahun 2012 sampai tahun 2016 (akhir Desember) menunjukkan hasil sebagaimana terlihat pada tabel 4.6 dibawah.

Tabel 4.6
Pencapaian Indikator Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	Target 2017
	Pertumbuhan PDRB						
1	a. Target	%	5,71	5,83	6,42	7,00	7,58
	b. Realisasi	%	4,12	4,43	5,17	4,89	-
	c. pencapaian (realisasi/target)	%	72,15	75,99	80,53	69,86	-
	PDRB Perkapita						
2	a. Target	Rp.000	15.731,92	15.696,40	17.248,15	17.607,05	-
	b. Realisasi	Rp.000	16.919,700	18.780,70	20.799,90	20.749,90	-
	c. pencapaian (realisasi/target)	%	107,55	119,65	117,85	117,85	-
	Pertumbuhan Sektor Industri di PDRB						
3	a. Target	%	3,00	3,10	3,30	3,30	6,54
	b. Realisasi	%	4,53	2,22	3,06	3,06	-
	c. pencapaian (realisasi/target)	%	151,00	71,61	92,73	92,73	-
	Pertumbuhan Sektor Jasa di PDRB						
4	a. Target	%	5,00	5,50	6,50	6,50	-
	b. Realisasi	%	8,42	7,81	7,01	7,01	-
	c. pencapaian (realisasi/target)	%	168,40	142,00	107,85	107,85	-
	Pertumbuhan Sektor Pertanian di PDRB						
5	a. Target	%	0,50	1,00	1,50	2,00	-
	b. Realisasi	%	- 0,93	0,68	2,16	3,23	-
	c. pencapaian (realisasi/target)	%	- 186,0	68,00	144,00	161,50	-
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
6	a. Target	%	69,49	70,13	70,77	71,41	72,05
	b. Realisasi	%	62,12	62,56	63,53	63,99	-
	c. pencapaian (realisasi/target)	%	102,25	89,21	89,77	89,61	-
	Angka Harapan Hidup (AHH)						
7	a. Target	Thn	63,00	63,37	63,73	64,10	64,47
	b. Realisasi	%	64,42	64,69	64,94	65,00	-
	c. pencapaian (realisasi/target)	%	102,25	101,77	101,90	101,56	-
	Rata-Rata Lama Sekolah						
8	a. Target	Thn	7,25	7,69	7,86	8,03	8,19
	b. Realisasi	Thn	6,42	6,47	6,81	6,98	-
	c. pencapaian (realisasi/target)	%	85,37	84,14	86,64	86,92	-
	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)						
9	a. Target	Thn	-	-	-	-	-
	b. Realisasi	Thn	11,31	11,54	11,72	11,83	-
	c. pencapaian (realisasi/target)	%	-	-	-	-	-
	Tingkat Masyarakat Miskin						
10	a. Target	%	-	-	-	-	-
	b. Realisasi	%	5,12	5,19	5,37	4,75	-
	c. pencapaian (realisasi/target)	%	-	-	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat						
11	a. Target	%	-	-	-	-	-
	b. Realisasi	%	63,4	71,1	71,4	85,5	85
	c. pencapaian (realisasi/target)	%	-	-	-	-	-
	Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)						
12	a. Target	Nilai	-	-	-	-	-
	b. Realisasi	Nilai	C	C(46,09)	CC(50,02)	BB(70-80)	BB
	c. pencapaian (realisasi/target)	Nilai	-	-	-	-	-
	Opini BPK						
13	a. Target	Nilai	-	-	-	-	-
	b. Realisasi	Nilai	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
	c. pencapaian (realisasi/target)	Nilai	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
14	a. Target	Nilai	-	-	-	-	-
	b. Realisasi	Nilai	Tinggi	SangatTinggi	SangatTinggi	SangatTinggi	SangatTinggi
	c. pencapaian (realisasi/target)	Nilai	-	-	-	-	-

Sumber: LKPJ Bupati Barito Kuala 2012 – 2017

Capaian kinerja utama adalah capaian kinerja yang menggambarkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan indikator makro dengan dukungan capaian program dan kegiatan pada masing- masing SOPD, serta capaian kinerja RPJMD pada masing- masing urusan. Capaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama 5(lima) tahun yaitu periode 2012-2016 (sebab data 2017 belum semua tersedia) yang meliputi:

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. APBD Kabupaten Barito Kuala, kenaikannya mengalami fluktuasi yang tajam, jika dilihat kenaikannya mencapai rata- rata 6,68% per tahun.
 - b. Anggaran Pendapatan Daerah kenaikannya mencapai rata- rata 8,25% per tahun. Nilai PAD realisasi kenaikannya pada periode 2012-2017 mencapai rata- rata 13,11% per tahun.
 - c. Begitu juga untuk Belanja, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk mengukur tingkat keberhasilannya harus berdasarkan RPJMD 2012- 2017 yang telah disepakati bersama yang sudah dibuatkan Perdanya.
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rencana dan realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2012- 2017 rata- rata tercapai 107,19%, nilai rencana dan realisasi PAD rata- rata tercapai 129,88%, nilai rencana dan realisasi dana perimbangan rata- rata tercapai 102,23%, dan nilai rencana dan realisasi lain- lain pendapatan yang sah rata- rata tercapai 116,47%.
3. Pengelolaan Belanja Daerah

Realisasi belanjanya mencapai rata- rata 93,30%, belanja tidak langsung realisasinya mencapai rata- rata 90,80%, belanja langsung realisasinya mencapai rata- rata 94,78%. Untuk itu memberikan apresiasi pada Bupati semua SOPD terkait atas kinerja yang baik.
4. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pengelolaan pembiayaan daerah yang tetap difokuskan pada pelayanan masyarakat, pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk

peningkatan penyertaan modal pada berbagai BUMD.

5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Urusan Wajib

Semua penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi urusan wajib sebanyak 26 urusan yang berhubungan dengan program dan kegiatan prioritas, realisasi kinerja dan analisis kinerja sangat baik.
 - b. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala pada periode 2012- 2017 sebanyak 8(delapan) urusan. Semua program dan kegiatan prioritasnya dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi untuk pencapaian indikator kinerja belum semua memasukan target yang ingin dicapai dalam RPJMD 2012-2017.
6. Capaian Kinerja Utama
 - a. Pertumbuhan ekonomi,

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala baru mencapai rata- rata sebesar 4,66%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini jauh dibawah target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2012-2017 (6,24%).
 - b. PDRB per kapita,

PDRB per kapita targetnya pada tahun 2013 sebesar Rp 15.731.920, kemudian pada tahun 2014 sebesar Rp15.969.400, tahun 2015 sebesar Rp 17.248.150 dan 2016 17.607.050, dan realisasi yang dicapai adalah pada tahun 2013 sebesar 16.919.700, pada tahun 2014 sebesar Rp.18.780.700, pada tahun 2015 sebesar Rp.20.749.900.
 - c. Pertumbuhan sektor industri,

pertumbuhan sektor industri (target RPJMD 6,54%) tetapi ini berbeda dengan target capaian kinerja (3,30%). Pertumbuhan sektor industri yang tercapai pada tahun 2013 sebesar 4,53%, tahun 2014 sebesar 2,22%, tahun 2015 sebesar 3,68% dan tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,06% jadi rata- rata periode 2012-2016 sebesar 3,37% (2013-2015), jadi jika mengacu pada dokumen Perda RPJMD tingkat pertumbuhan sektor industri ini tidak tercapai (baru tercapai 51,53%).
 - d. Pertumbuhan sektor jasa,

pertumbuhan sektor jasa realisasinya pada tahun pada tahun 2013 sebesar 8,42% pada tahun 2014 sebesar 7,81%, tahun 2015

- sebesar 6,82% dan tahun 2016 sebesar 7,01% jadi rata-rata sebesar 7,52%. Target RPJMD khusus jasa perdagangan adalah sebesar 9,54% sebab yang ada pada RPJMD hanya target jasa perdagangan. Jadi kesimpulannya target belum tercapai.
- e. Pertumbuhan sektor pertanian,
realisasi pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2013 sebesar 0,93%, tahun 2014 sebesar 0,68%, tahun 2015 sebesar 2,16% dan tahun 2016 sebesar 3,23% jadi rata-rata pertumbuhannya pada periode 2012-2016 adalah sebesar 1,26%, Tetapi dalam RPJMD tidak terukur.
- f. Indeks pembangunan manusia (IPM),
realisasi IPM pada tahun 2013 sebesar 62,12, kemudian pada tahun 2014 sebesar 62,56, tahun 2015 sebesar 63,53 dan tahun 2016 sebesar 63,99. Jika kita bandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2017 adalah sebesar 72,05, maka pembangunan IPM belum mencapai target yaitu baru 88,81% dari target RPJMD.
- g. Angka harapan hidup (AHH),
realisasi AHH pada tahun 2013 sebesar 64,42 tahun, kemudian pada tahun 2014 sebesar 64,49 tahun, tahun 2015 sebesar 64,94 tahun dan tahun 2016 sebesar 65,00 tahun. Jika kita bandingkan dengan target RPJMD pada masa berakhirnya jabatan Bupati sebesar 64,47 tahun, maka target yang ditetapkan RPJMD tercapai sebesar 100,82%, ini kita harus apresiasi kinerjanya.
- h. Rata-rata lama sekolah,
realisasinya pada tahun 2013 sebesar 6,42 tahun, kemudian pada tahun 2014 sebesar 6,47 tahun, tahun 2015 sebesar 6,81 tahun dan tahun 2016 sebesar 6,98 tahun. Tetapi dalam RPJMD tidak terukur. Untuk Perbandingan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,76 tahun.
- i. Angka harapan lama sekolah (HLS),
realisasinya pada tahun 2013 selama 11,31 tahun, tahun 2014 selama 11,54 tahun, tahun 2015 selama 11,72 tahun dan tahun 2016 selama 11,83 tahun. Tetapi dalam RPJMD tidak terukur. Untuk Perbandingan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 12,21 tahun.
- j. Tingkat kemiskinan,
realisasinya pada tahun 2013 sebesar 5,12%, kemudian pada tahun 2014 sebesar 5,19%, tahun 2015 sebesar 5,37% dan tahun 2016 sebesar 4,75%, Jika dibandingkan dengan target RPJMD pada akhir tahun masa jabatan Bupati sebesar 4,85%.
- k. Tingkat kepuasan masyarakat,
realisasinya indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2013 sebesar 63,40, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 71,10, tahun 2015 sebesar 71,40, tahun 2016 sebesar 85,5. Tetapi dalam RPJMD tidak terukur jadi tidak terukur.
- l. Akuntabilitas kinerja,
realisasi indikator nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 nilainya BB(70-80). Jika dibandingkan dengan target RPJMD pada akhir tahun masa jabatan Bupati nilainya BB.
- m. Opini BPK
Mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka diharapkan tercapai target.

SARAN

1. Hendaknya semua indikator kinerja sasaran mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Hendaknya semua indikator kinerja yang ingin dicapai mudah dan terukur, sebab masih banyak yang belum terukur. Hal ini bisa terjadi sebab pada awal pelaksanaannya belum dimasukkan, seharusnya ada revisi RPJM untuk menyesuaikan dengan peraturan Pemerintah yang baru diberlakukan.
3. Perlunya penelitian yang mendalam penyebab tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, ., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
- _____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah.
- _____. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
- Boediono. (1985). Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: Bpfe-UGM
- Bryant, Coralie, dan White Louise G. (1987), Manajemen Pembangunan, Jakarta LP3ES.
- Jhingan M.L. (2012). Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Mudrajad, Kuncoro. (2010). Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Sadono Sukirno. (2006). Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- Tarigan, Robinson (2005) Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta. PT. Gunung Agung
- Todaro, Michael P. Dan Smith, Stephen. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*.
- Munandar, Haris [Penerjemah], Jakarta: Erlangga.
- Soleh, Chabib dan Rocmansjah, Heru. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Jakarta : Fokusmedia, 2010.
- Subdit Data Keuangan Daerah. Dit. EPIKD, *Profil ABD TA 2012*, Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012.